

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, dan kepala seksi desa.

B. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana dari total populasi pada penelitian ini yaitu 87 desa di Kabupaten Kulon Progo yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 30 desa. Setiap sampel akan diwakili aparatur desa yang berkaitan langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagai responden. Responden yang mewakili desa diantaranya kepala desa selaku pemimpin pemerintahan di desa dan memiliki kekuasaan atas keuangan desa, sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan, bendahara selaku staf administrasi keuangan termasuk didalamnya bagian penatausahaan keuangan desa dan dari masing-masing kepala urusan desa serta kepala seksi desa.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif data primer yang diperoleh dari objek penelitian dengan pengisian kuesioner yang

dibagikan kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kinerja pengelolaan keuangan desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada perwakilan masing-masing desa yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Sampel desa yang digunakan sebanyak 30 desa, dimana kuesioner akan disebar di masing-masing desa tersebut.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen.

a. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Kinerja adalah *Performance* yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu yang berujung pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan rencana strategik organisasi (Pratolo dan Jatmiko, 2017). Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari pengukuran dengan indikator yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis dan pelaporan yang memadai dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2009). Indikator tersebut diukur menggunakan skala likert sesuai jawaban responden pada kuesioner.

Item pernyataan kuesioner yang digunakan pada variabel kinerja pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini sudah pernah digunakan oleh

Munti dan Fahlevi (2017) yang dilakukan pada Kabupaten Bireuen Aceh. Peneliti menggabungkan serta memodifikasi beberapa item pernyataan untuk memenuhi dimensi dari indikator yang digunakan.

Kuesioner penelitian dengan beberapa item pernyataan diisi oleh responden dengan menjawab kolom tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” yaitu menggunakan skala likert 1 sampai 5.

2. Variabel Independen.

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu :

a. Kapasitas Aparatur Desa.

Kapasitas merupakan kemampuan individu, lembaga atau organisasi, dan masyarakat dalam mencapai sebuah kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, untuk melakukan sebuah perubahan apabila dibutuhkan guna keberlangsungan dan keberlanjutan usaha dengan tujuan untuk pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala desa sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis. Dalam pengelolaan keuangan desa kegiatan perencanaan dikoordinasi oleh sekretaris desa, bendahara bertugas sebagai administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa maka staf pemerintahan desa harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Menilai kapasitas

aparatur desa bisa dilihat dari tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (Islami, 2016).

Variabel kapasitas aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang telah digunakan pada penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang terdiri dari enam pernyataan. Responden menjawab enam pernyataan tersebut dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

b. Ketaatan Regulasi.

Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus taat pada peraturan yang merujuk pada Permendagri No. 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada empat asas yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran. Adapun konsep atau pedoman yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Variabel ketaatan regulasi diukur menggunakan kuesioner yang didasarkan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang terdiri dari tujuh item pernyataan. Responden menjawab pernyataan dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

c. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Kualitas pengawasan merupakan tindakan pengendalian terhadap suatu pekerjaan bawahan dan dilakukan oleh pengawas secara rutin untuk

mendapatkan hasil yang optimal. Tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis. Kualitas Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dari jadwal pelaksanaan pengawasan, standarisasi pengawasan, dan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh BPDesa.

Variabel kualitas Badan pengawas BPD diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017) dengan tujuh item pernyataan. Responden menjawab pernyataan dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat) untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah (Santoso, 2018). Penggunaan teknologi informasi mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya. Pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari tersedianya jaringan internet, baiknya

pemanfaatan jaringan internet, penggunaan aplikasi, laporan keuangan yang terkomputerisasi, dan software sesuai dengan UU (Nurillah, 2014).

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan kuesioner yang telah digunakan pada penelitian Nurillah (2014) dengan lima item pernyataan. Responden menjawab pernyataan dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

e. Komitmen Aparatur Desa.

Komitmen adalah gabungan dari keyakinan dan motivasi seseorang (Moehariono, 2014). Keyakinan adalah tingkat kepercayaan seseorang yang dimilikinya untuk mencapai sesuatu. Sedangkan motivasi adalah sebuah pegangan atau acuan seseorang dalam mencapai tujuannya dengan baik.

Sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi berdirinya sebuah organisasi dan sebagai salah satu penentu keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Berdirinya sebuah organisasi membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dan setiap program organisasi. Dari setiap tahapan tersebut membutuhkan komitmen besar dari pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan mengemban tugas berat dan dituntut memiliki komitmen dengan semangat tinggi, kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan

tugas pemerintahan, komitmen aparatur desa dapat diukur dengan tiga dimensi yaitu afektif, keberlanjutan dan normatif (Porter et al., 1974).

Variabel komitmen aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Mada *et al* (2017) dengan lima item pernyataan. Responden menjawab pernyataan dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

f. Pendamping Desa.

Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh SKPD kabupaten atau kota dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak lain (PP No. 43 Tahun 2014 pasal 128 ayat 2). Sesuai dengan Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa, menyatakan bahwa tujuan dari pendampingan desa adalah (1) meningkatkan kapasitas serta efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan, (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor, (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik adalah pengukur tercapainya tujuan dari pendampingan desa. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari pelaksanaan pengawasan, penilaian, teguran dan saran

perbaikan, pelatihan, pembagian ilmu pengetahuan, pembinaan dan pengarahan (Erawati, 2012).

Variabel komitmen aparatur desa diukur menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Erawati (2012) dengan lima item pernyataan. Responden menjawab pernyataan dengan tanggapan “Sangat Tidak Setuju” sampai dengan “Sangat Setuju” dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

F. Uji Kualitas Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan untuk menguji kualitas instrumen dalam penelitian ini digunakan uji validitas data dan uji reliabilitas data, dimana pengujian ini mewakili atau mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari objek/subjek penelitian agar data-data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Uji Validitas.

Uji validitas mengacu kepada keandalan instrumen dalam pengolahan data untuk mengukur data yang digunakan apakah valid dan relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu statistik *Bivariate Correlation Pearson*, suatu alat ukur penentu apakah data yang di uji benar jika nilai dari correlation pearson pada t hitung lebih dari t tabel dan memiliki nilai signifikansi 0,05.

2. Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas adalah alat bantu yang digunakan untuk mengetahui konsistensi data yang diteliti dapat digunakan lebih dari satu kali pengukuran.

Metode *Cronbach's Alpha* dipakai pada uji reliabilitas penelitian ini. Menurut Sugiyono (2014) data dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha uji reliabilitas lebih besar sama dari 0,60.

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi klasik pada hipotesis dan data yang akan digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan data yang digunakan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal atau tidak. Uji statistik normalitas di lihat dari nilai residualnya, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Unstandardized Residual* pada *Kolmogorov-Smirnov(K-S)* lebih besar dari *alpha* 0,05 atau nilai signifikan besar dari 0,05. Sebaliknya data dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai residual lebih kecil dari *alpha* 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas. Alat statistik yang digunakan pada pengujian multikolinearitas adalah *Variance Inflation Faktor (VIF)*, dilihat pada *collinearity statistics* nilai VIF harus lebih kecil dari 10 atau nilai *Tolerance* besar dari 0,1. Jika nilai $VIF > 10$

dapat dikatakan mengandung multikolinearitas maka variabel harus diganti atau dikeluarkan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah adanya ketidaksamaan varians pada model regresi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independent pada persamaan regresi. Syarat terpenuhinya uji heteroskedastisitas apabila nilai absolut residual sig lebih besar dari α 0,05, maka dapat di asumsikan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independet.

2. Alat Analisis Data.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengujian yang menyajikan gambaran dan deskriptif data penelitian, serta menjelaskan karakteristik data yang diteliti. Dalam pengujian ini terdapat beberapa karakteristik data dari perhitungan mean, minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghazali, 2011).

b. Model Analisis (Analisis Regresi Linier Berganda)

Analisis regresi linier (*linear regression analysis*) adalah teknik statistik yang bertujuan untuk membuat model penelitian dan mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen

(Khitomah, 2013). Dalam hal ini apakah terdapat pengaruh dari kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Model pengujian regresi berganda untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa
 X1= Kapasitas Aparatur Desa
 X2= Ketaatan Regulasi
 X3=Kualitas Pengawasan BPD
 X4= Pemanfaatan Teknologi Informasi
 X5= Komitmen Aparatur Desa
 X6= Pendamping Desa
 α = Konstanta
 ε = Error

c. Uji Nilai t (Uji Parsial)

Uji nilai t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada masing-masing variabel independen. Apabila nilai sig besar dari *alpha* 0,05 maka hipotesis penelitian diterima dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

d. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinan merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat persentase kecocokan model atau menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian ini

dilihat dari nilai *Adjusted R Square* (R^2), dimana nilai tersebut mampu menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinan dan nilai tersebut harus diakumulasikan dalam persentase, kemudian sisanya akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian (Nazarudin dan Basuki, 2016).

e. Uji Nilai F (Simultan)

Uji nilai F atau uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Efilia, 2011). Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai signifikan < 0.05 , artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen.